

NASKAH PUBLIKASI
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN COVER ASURANSI DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG BOYOLALI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ISNA FITRIANA NINGSIH
C.100.110.088

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

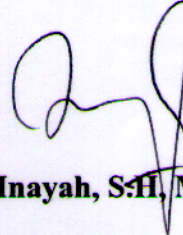
Tanggal : 12 Februari 2016

Pembimbing I



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)

Pembimbing II

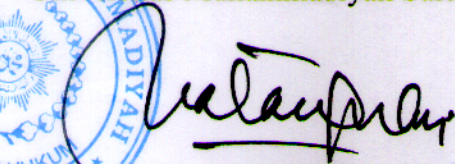


(Inayah, S.H., M.H)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN COVER ASURANSI DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG BOYOLALI**

**Isna Fitriana Ningsih
C100110088
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
fitrianaisna@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian asuransi sebagai cover jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah calon debitur dan bentuk perlindungan hukum hak dan kewajiban yang diterima oleh nasabah apabila telah menyetujui perjanjian kredit yang diajukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian asuransi sebagai cover jaminan kredit yakni nasabah terlebih dahulu harus terikat oleh adanya perjanjian kredit, dengan terikatnya nasabah dalam suatu perjanjian kredit, maka secara otomatis dari pihak Bank telah mengasuransikan. Mengenai perlindungan hukum yang diterima jika dalam klausul perjanjian kredit tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya nasabah yang pernah mendapatkan fasilitas kredit yang tercover asuransi merasa puas mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: cover asuransi, fasilitas kredit, perlindungan hukum

ABSTRACT

This study aims to determine the procedures for granting credit insurance cover insurance as proposed by the customer debtor and form the legal protection of the rights and obligations accepted by the customer if it has approved the proposed credit agreement by Bank Rakyat Indonesia (BRI). This research used juridical empirical approach using a type of primary data and secondary data. Data collection techniques using literature study, documentation, and interviews, then analyzed by qualitative analysis. The results show the procedure of the insurance as credit guarantees that cover the customer must first be bound by the credit agreement, with the dependent customers in a credit agreement, it is automatically part of the Bank has insured. Regarding legal protection is acceptable if a clause in the loan agreement is not in accordance with Article 18 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, basically the customers who have ever received a credit facility that covered insurance are satisfied with legal protection.

Keywords: insurance cover, credit facilities, legal protection

PENDAHULUAN

Setiap orang dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari berbagai resiko yang mungkin akan muncul. Untuk mengurangi resiko, diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut. Perusahaan itu adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung segala resiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap resiko yang akan di hadapi oleh nasabahnya.¹

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Perniagaan atau *Wetboek van Koopenhandel*, bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.²

Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 189/pmk.05/2010 pada pasal 1 ayat (2).

Mengingat pentingnya kredit perbankan terhadap pembangunan maka dengan demikian kredit mempunyai fungsi dan tujuan. Menurut Thomas Suyatno, fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara

¹ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 291.

² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Intermasa, hal 1.

lain:³ (1) Meningkatkan daya guna uang. (2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. (3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. (4) Salah satu alat stabilitas ekonomi. (5) Meningkatkan gairah usaha. (6) Meningkatkan pemerataan pendapatan. (7) Meningkatkan hubungan internasional.

Sedangkan tujuan kredit antara lain adalah:⁴ (1) Untuk ikut serta menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. (2) Untuk meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. (3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. (4) Memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. (5) Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi.

Mengenai proses analisis kredit ini, bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan debitur sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.⁵ Sejak kredit diberikan kepada nasabah, pemberi kredit menghadapi resiko atas kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit itu dari nasabah sehingga pemberi kredit menderita kerugian.⁶ Dengan adanya asuransi tersebut, maka jika terjadi tunggakan kredit yang disebabkan meninggalnya debitur maka kredit tersebut akan tetap dapat dilunasi, karena pihak bank dapat mengajukan klaim

³ Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 233.

⁴ *Ibid.*

⁵ Gatot Supratomo, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan, hal 32.

⁶ Radiks Purba, 1995, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, hal 405.

pada perusahaan asuransi yang bersangkutan, kemudian pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk membayar sisa kredit yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen atau buku-buku literatur, bahan hukum tertulis dan data primer yakni hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari berbagai narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Asuransi Sebagai Cover Jaminan Kredit Yang Diajukan Oleh Calon Debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Prosedur pemberian asuransi sebagai cover jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali, yakni nasabah terlebih dahulu harus terikat oleh adanya perjanjian kredit, dengan terikatnya nasabah dalam suatu perjanjian kredit maka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali secara otomatis dari pihak Bank telah mengasuransikan. Untuk proses asuransi atas kredit pensiun dan kredit tetap, pihak Bank akan mendaftarkan secara otomatis ke pendaftaran online berupa asuransi jiwa di perusahaan asuransi mitra Bank yang telah bekerjasama dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali.⁷

Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang berikut Syarat Umum Perjanjian Kredit dan Pinjaman yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terdapat klausul yang memuat ketentuan mengenai Asuransi yaitu (1) Pasal 5

⁷ Dian Ratnawati, Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Jumat, tanggal 4 Desember 2015, pukul 12.30 WIB.

Surat Pengakuan Hutang tentang Asuransi yang didalamnya berisi tentang Bank yang untuk kepentingannya dapat mempertanggungkan dan mengasuransikan jiwa yang berhutang kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh Bank atas beban yang berhutang dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku dan bila perlu mempertanggungkan pula agunan atas pinjaman yang diajukan kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank dengan Banker's Clause. Yang berarti klausul asuransi tersebut wajib dilaksanakan untuk menjamin pinjaman yang diajukan oleh Debitur. Hal tersebut semata-mata untuk menghindari kerugian dikemudian hari apabila Debitur atau Yang Berhutang meninggal dunia yang secara otomatis tidak dapat melunasi Kredit atau pinjaman yang sudah diperjanjikan dengan Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (2) Pasal 16 Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang menyebutkan bahwa Bank dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan kredit ini pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui Bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kredit Pensiun dan Kredit tetap Asuransi yang diwajibkan adalah asuransi jiwa untuk Nasabah (debitur) akan tetapi apabila jumlah pinjaman yang diajukan melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank maka pinjaman tersebut dapat dipertimbangkan dengan menyertakan agunan tambahan. Agunan sebagai jaminan tambahan atas kredit yang diajukan juga dapat diasuransikan untuk menghindari resiko hal-hal yang tidak diinginkan bagi Bank maupun Yang Berhutang di kemudian hari. (3) Pasal 19 Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tentang Asuransi Kredit yang diwajibkan bagi nasabah (debitur) semata-mata untuk menjamin piutang yang telah

diperjanjikan dibayar dengan sebagaimana mestinya dan apabila pinjaman Yang Berhutang/Pengambil Kredit telah dibayar lunas maka secara otomatis perjanjian kredit tersebut telah selesai termasuk perjanjian asuransi sebagai cover jaminan kredit yang diperjanjikan.

Mengenai Kredit Pensiun dan Kredit tetap Asuransi yang diwajibkan adalah asuransi jiwa untuk Nasabah (debitur) akan tetapi apabila jumlah pinjaman yang diajukan melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank maka pinjaman tersebut dapat dipertimbangkan dengan menyertakan agunan tambahan. Agunan sebagai jaminan tambahan atas kredit yang diajukan juga dapat diasuransikan untuk menghindari resiko hal-hal yang tidak diinginkan bagi Bank maupun Yang Berhutang di kemudian hari.⁸

Guna terealisasinya perjanjian kredit tersebut juga terdapat prosedur pengajuannya yaitu: (1) Permohonan Kredit, bagi calon nasabah/debitur yang akan mengajukan kredit diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan kredit terlebih dahulu yang telah disediakan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Cabang Boyolali. (2) Analisis Kredit, selanjutnya dianalisis oleh *account officer* (AO) Komersial di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Boyolali. Tujuannya untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan. (3) Keputusan Kredit, keputusan kredit didasarkan pada hasil analisis kredit yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) Komersial. Wewenang untuk memutus suatu kredit diberikan kepada pimpinan cabang. Keputusan kredit berupa penolakan permohonan kredit atau persetujuan permohonan kredit. (4)

⁸ Dian Ratnawati, Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Jumat, tanggal 4 Desember 2015, pukul 12.30 WIB.

Pembuatan Perjanjian Kredit, pembuatan perjanjian kredit menjadi tugas bagian Administrasi Kredit.

Selanjutnya, untuk menjadi terikat atas perjanjian kredit, ada prosedur pengajuannya bagi calon nasabah yang hendak mengajukan kredit/mengambil pinjaman kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali, *pertama* calon nasabah mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank, kemudian pihak Bank akan mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dan menganalisis apakah calon nasabah pernah ambil pinjaman ke Bank lain dan berjalan lancar atau macet. *Kedua* analisis kredit, analisis kredit merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi dan laporan dari kebenaran berkas-berkas pinjaman yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kredit. *Ketiga* keputusan kredit, keputusan kredit berupa: penolakan permohonan kredit dan persetujuan permohonan kredit. *Keempat* pembuatan perjanjian kredit, didasarkan pada persetujuan permohonan kredit apabila permohonan kredit disetujui oleh pihak Bank maka tahap selanjutnya dibuatnya perjanjian kredit. *Kelima* penyerahan jaminan kredit, setelah dibuatnya perjanjian kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak selanjutnya pihak dari calon nasabah menyerahkan jaminan kredit kepada pihak Bank. *Keenam* pencairan kredit, setelah permohonan kredit disetujui dan telah diterimanya jaminan dari pihak calon nasabah kepada pihak Bank maka selanjutnya pencairan kredit, yang telah dikurangi biaya-biaya yakni Premi Asuransi, Percetakan, Provisi, dan biaya-biaya lainnya.⁹

⁹ Dian Ratnawati, Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Jumat, tanggal 4 Desember 2015, pukul 12.30 WIB.

Prosedur pemberian asuransi sebagai cover jaminan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Ratnawati salah satu Staff Administrasi Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Cabang Boyolali, yaitu pertama-tama calon nasabah harus sudah terikat atas perjanjian kredit yang disepakati dengan pihak Bank, sehingga dalam hal ini calon nasabah harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali.¹⁰

Perjanjian kredit itu pihak debitur beserta suami atau istri dari debitur ikut menandatangani di atas materai seharga Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah). (5) Penyerahan Jaminan Kredit, penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur lalu ditindaklanjuti dengan penyerahan jaminan oleh debitur. Jaminan ini diserahkan untuk disimpan oleh kreditur sampai pinjaman debitur dilunasi. (6) Pencairan Kredit, setelah putusan permohonan kredit disetujui maka langsung direalisasikan pencairan kredit dengan potongan-potongan untuk biaya-biaya diantaranya: Premi Asuransi, Percetakan, Provisi, dan biaya-biaya lainnya. Lamanya pengajuan permohonan sampai pencairan kredit berkisar antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan tahapan *pertama* sampai dengan tahapan *keenam* yang dijelaskan diatas tersebut itulah bagaimana prosesnya perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Boyolali dengan debiturnya. Setelah perjanjian kredit terjadi antara pihak nasabah dengan pihak PT. Bank

¹⁰ Dian Ratnawati, Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Jumat, tanggal 4 Desember 2015, pukul 12.30 WIB.

Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Boyolali maka secara otomatis dari pihak Bank telah mengasuransikan. Untuk prosedur asuransi atas kredit pensiun dan kredit tetap, pihak Bank akan mendaftarkan secara otomatis ke pendaftaran online berupa asuransi jiwa di perusahaan asuransi mitra Bank yang telah bekerjasama dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Boyolali. Kemudian setelah didaftarkan lalu nasabah diberikan form pembayaran premi sebagai bukti asuransi, yang mencetak bukti asuransi berupa form pembayaran premi yaitu oleh supervisor kredit.

Asuransi sebagai cover jaminan kredit yang diusung oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) Tbk. Cabang Boyolali dengan perusahaan asuransi mitra Bank istilahnya yaitu *bancassurance*. Bagi pihak Bank yang telah menerapkan *bancassurance* maka harus mengingat menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai *bancassurance* dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, sehingga pihak nasabah tidak akan merasa dirugikan.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Selaku Debitur di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Berdasarkan surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang disodorkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) Tbk. Cabang Boyolali kepada Debitur apabila telah mengambil pinjaman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) Tbk. Cabang Boyolali, berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa dari surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, ada beberapa klausula yang

pada akhirnya “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak, yaitu pihak Debitur, sehingga pihak debitur layak memperoleh perlindungan hukum.

Pihak debitur (konsumen) memperoleh perlindungan hukum apabila klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditur (PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Cabang Boyolali) dalam surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Cabang Boyolali telah menerapkan klausula baku dalam surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang telah disepakatinya dengan debitur. Dan debitur memperoleh perlindungan hukum dari segala risiko yang timbul apabila terjadi hal-hal seperti yang tercantum dalam klausula surat pengakuan hutang maupun dalam klausula syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang telah melanggar ketentuan pencantuman klausul baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini untuk klausul-klausul yang melanggar ketentuan tersebut yakni sebagai berikut:

(a) Pasal 3 dalam surat pengakuan hutang, mengenai hal keterlambatan penunhan kewajiban dari pihak debitur dalam pembayaran provisi, biaya administrasi dan denda, klausul ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1)

huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(b) Pasal 7 dalam surat pengakuan hutang, mengenai hal pengawasan dan pemeriksaan, klausul ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (c) Pasal 8 dalam surat pengakuan hutang, mengenai hal pernyataan bahwasannya debitur (yang berhutang) telah menyatakan kebenarannya, klausul ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya (d) Pasal 11 dalam syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, mengenai hal kreditur mengalihkan tanggung jawabnya kepada debitur, klausul ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (e) Pasal 15 dalam syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, mengenai hal kewajiban debitur untuk mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit, klausul ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berikutnya (f) Pasal 19 ayat (1) dalam syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, mengenai hal kewajiban debitur mengenai pembayaran hutangnya dan menimbulkan hak baru bagi kreditur yaitu mengenai semua harta benda dijaminkan kepada Bank, tagihan yang dipindahkan kepada Bank, asuransi dengan Bankers Clause untuk dan atas nama Bank, klausul ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (g) Pasal 26 dalam syarat-syarat umum perjanjian

pinjaman dan kredit, mengenai hal Bank yang diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh sebab apapun untuk mengambil seluruh atau sebagian uang asuransi yang diterima dari Perusahaan Asuransi dimaksud guna diperhitungkan dengan hutangnya debitur, klausul ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya konsumen memperoleh Perlindungan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena sifat dari peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal yang dilarang, sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh undang-undang, khususnya yang memuat mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner terkait tingkat kepuasan atas perlindungan hukum terhadap nasabah yang pernah mendapatkan fasilitas kredit yang tercover asuransi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali. Dapat diambil kesimpulan bahwa, pada dasarnya konsumen merasa puas mendapatkan perlindungan hukum dari cover asuransi dalam perjanjian kreditnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali.

Berdasarkan hasil dari kuesioner tersebut penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya dari pihak nasabah sendiri sebenarnya kurang mengetahui/memahami akan hak dan kewajibannya sebagai seorang nasabah, karena bisa dikatakan para nasabah tidak memahami mengenai hak dan kewajibannya baik kewajiban secara umum yakni mengenai kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya, maupun kewajiban secara khusus sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit. Karena dalam hal ini nasabah pasti hanya

bersikap tunduk dan taat akan perjanjian kredit, agar kredit yang diajukan cepat terealisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Prosedur Pemberian Asuransi Sebagai Cover Jaminan Kredit Yang Diajukan Oleh Calon Debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni nasabah terlebih dahulu harus terikat oleh adanya perjanjian kredit, dengan terikatnya nasabah dalam suatu perjanjian kredit maka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Boyolali secara otomatis dari pihak Bank telah mengasuransikan. Asuransi sebagai cover jaminan kredit yang diusung oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) Tbk. Cabang Boyolali dengan perusahaan asuransi mitra Bank istilahnya yaitu *bancassurance*. Bagi pihak Bank yang telah menerapkan *bancassurance* maka harus mengingat menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai *bancassurance* dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, sehingga pihak nasabah tidak akan merasa dirugikan.

Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Selaku Debitur di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam surat pengakuan hutang dan syarat-syarat perjanjian dan kredit yang disodorkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) Tbk. Cabang Boyolali kepada Debitur apabila telah mengambil pinjaman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, (persero) Tbk. Cabang Boyolali, berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Debitur memperoleh perlindungan

hukum dari segala risiko yang timbul apabila terjadi hal-hal seperti yang tercantum dalam klausula surat pengakuan hutang maupun dalam klausula syarat-syarat perjanjian dan kredit yang telah melanggar ketentuan pencantuman klausul baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a, f dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana tingkat kepuasan atas perlindungan hukum terhadap nasabah yang pernah mendapatkan fasilitas kredit yang tercover asuransi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali cukup tinggi. Dengan demikian, konsumen merasa puas mendapatkan perlindungan hukum dari cover asuransi dalam perjanjian kreditnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali.

Saran

Pertama, Bagi Debitur (konsumen), sebaiknya lebih berhati-hati sebelum melibatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit, Pada dasarnya suatu perjanjian kredit terdapat klausula baku dan klausul eksonerasi yang berpotensi merugikan konsumen. Sebaiknya sebagai nasabah/debitur untuk lebih memahami serta mengetahui dulu atas hak dan kewajiban-kewajibannya mengenai kewajibannya secara umum dan secara khusus sebagaimana yang tercantum dalam suatu perjanjian kredit, baik dalam surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian dan kredit, serta sebaiknya untuk lebih memahami tujuan dari adanya cover asuransi dalam perjanjian kredit tersebut.

Kedua, Bagi Pelaku Usaha (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Boyolali), dalam pemuatan klausula baku sebaiknya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena mengingat agar pihak debitur tidak banyak merasa dirugikan, sehingga nasabah/debitur merasa mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan perjanjian kreditnya.

Ketiga, Bagi seluruh lapisan warga masyarakat secara umum, dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan klausula asuransi pada kredit perbankan dan bagaimana hak dan kewajiban nasabah dapat terlaksana dengan baik apabila menyetujui asuransi sebagai *cover* jaminan kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Intermasa.

Djumhana, Muhammad. 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Supratomo, Gatot. 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan.

Purba, Radiks. 1995, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Kitab Undang Undang Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan 189/pmk.05/2010.